

## KEBAKARAN LAHAN BASAH DAN FAKTOR MANUSIA SEBAGAI PENYEBABNYA

### Wetland Fires and Human Factors as the Contributing Factor

Ali Alamsyah Siregar<sup>1)</sup>, Mona Lestari<sup>\*</sup>, Novrikasari<sup>1)</sup>, Dini Arista Putri<sup>2)</sup>, Desheila Andarini<sup>1)</sup>, Rizka Faliria Nandini<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>*Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya*

<sup>2)</sup>*Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya*

#### Abstract

Currently, forest and land fires have become a regular disaster in Indonesia. The cause of the fires was mostly due to human factors. Ogan Ilir is an area with forest and land fires every year because its dominated by wetlands. The study aim was to analyze human factors as the cause of land fires in knowledge factors, cultural factors, social factors, economic factors, and policy roles. This study is a descriptive analytic study with a qualitative approach. Data was obtained through interviews with key informants who had been sentenced to be fire perpetrators and regular informants from Regional Disaster Management Agency of Regency and Police in Ogan Ilir. The cause of the community burning the land was due to the low level of community understanding regarding the impact of burning the land with the intention of clearing the land and the presence of sonor culture which the community practiced almost every year on the residual harvest. In addition, there are social conflicts between the community and the surrounding land owners, cost savings in land clearing, and the community continues to burn land even though regulations related to land burning already exist. The main factors that cause people to burn are social and economic factors. It is necessary to enforce laws regarding idle land whose ownership is unclear and the local government can provide borrowing heavy equipment at rental prices that are affordable to the community.

*Keywords : Human factors, land fires, social conflict, sonor culture, wetlands*

#### PENDAHULUAN

Lahan basah merupakan sumber kehidupan yang memiliki banyak manfaat baik sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup maupun sebagai fungsi ekologis seperti mengendalikan banjir, mencegah erosi, serta sebagai pengendali iklim. Menurut Konvensi Ramsar, lahan basah merupakan lahan gambut dan area rawa yang terbentuk secara alami maupun buatan, bersifat permanen atau sementara, memiliki air yang statis atau mengalir, payau atau asin, serta termasuk pula area air laut dengan kedalaman saat surut tidak melebihi enam

meter (Harahap, 2016). Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan basah sangat luas sekitar 10,8% dari luas daratan atau diperkirakan 20,6 juta hektar (Rahmawaty, Rauf, & Siregar, 2014).

Namun saat ini, lahan basah sudah banyak disalahgunakan yang menyebabkan kerusakan akibat tidak dikelola dengan tepat. Pada umumnya, lahan basah dikelola menjadi lahan pertanian atau perkebunan untuk menghasilkan tanaman perkebunan, tanaman pangan, maupun tanaman hortikultura buah (Masganti, Wahyunto, Ai Dariah, Nurhayati, 2014). Maka dari itu, perlu dilakukan pengelolaan dan

pengendalian secara bijaksana guna tetap menjaga kelestarian ekosistem lahan basah.

Masyarakat Indonesia umumnya menggunakan metode tebang bakar untuk membuka lahan. Metode tersebut dipilih karena alasan lebih mudah, murah, cepat, serta dapat meningkatkan unsur hara tanah sehingga membuat tanah menjadi lebih subur. Namun kurangnya pengetahuan mengenai dampak jangka panjang dari penerapan metode masih belum banyak diketahui masyarakat. Dampak jangka panjang metode tebang bakar tersebut adalah dapat menyebabkan kesuburan tanah menjadi menurun serta menimbulkan kebakaran dan bencana kabut asap yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia (Beja, Mella, & Soetedjo, 2015). Dalam membuka lahan, masyarakat seringkali tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga berpotensi menyebabkan rusaknya lahan akibat kebakaran yang besar. Kebakaran besar dan sulit dikendalikan utamanya terjadi di lahan gambut.

Menurut *Wetlands International*, luas lahan gambut di dunia berjumlah 381,4 hektar dengan sebaran Eropa dan Rusia sebanyak 44,08%, Amerika sebanyak 40,50%, Indonesia sebanyak 6,59%, Afrika sebanyak 3,41%, Antartika sebanyak 0,41%, Australia dan Pasifik sebanyak 1,91%, dan Asia lainnya sebanyak 2,74%.<sup>5</sup> Indonesia memiliki lahan gambut yang sangat luas hingga menduduki posisi ke empat di dunia yang diperkirakan mencapai 14,95 juta hektar yang tersebar dan mendominasi tiga pulau utama yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua (Akbar, Faidil, Adriani, & Saefudin, 2013; Saharjo et al., 2018; Wahyunto, Ritung, Nugroho, Sulaiman, & Hikmarullah, 2013).

Luasnya lahan gambut di Indonesia menyebabkan kasus kebakaran di lahan gambut Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dalam kasus pencemaran udara akibat kebakaran terutama di Riau dan Kalimantan yang merupakan wilayah dengan jumlah kebakaran hutan dan lahan terparah hingga menyebabkan dampak gangguan kesehatan bagi masyarakat

wilayah itu sendiri maupun negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura (Dey, Djumaty, & Kunci, 2020; Nurkholis et al., 2016). (Dey et al., 2020; Nurkholis et al., 2016) Kabut asap menyebabkan penyakit seperti ISPA, bronkitis, pneumonia, iritasi mata, dan beberapa penyakit infeksi pernapasan lainnya akibat tercemarnya udara akibat kebakaran hutan dan lahan (Perwitasari & Sukana, 2012; Sukana & Bisara, 2015).

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun hingga menimbulkan ketertarikan masyarakat maupun peneliti di dunia akibat dampak yang ditimbulkannya. Kejadian kebakaran di seluruh dunia terbesar yaitu pada tahun 1997/1998 seluas 25 juta hektar termasuk pula di Indonesia yang terjadi akibat *land clearing* bersamaan dengan adanya fenomena *El Nino* (Tacconi, 2003). Tahun 2002, kebakaran yang terjadi di Indonesia mencapai 35.496,73 hektar, tersebar di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan beberapa wilayah lainnya. Kebakaran cukup besar terjadi pula pada tahun 2015 dengan luas mencapai 2.611.411,44 hektar. Kebakaran lahan paling besar terjadi di Provinsi Sumatera Selatan seluas 646.298 hektar, kemudian diikuti Provinsi Kalimantan Tengah seluas 583.833 hektar, Provinsi Papua seluas 350.005,30 hektar, Provinsi Riau seluas 183.858 hektar, dan Provinsi Jambi seluas 115.634 hektar (SiPongi, 2020). Kebakaran kembali terjadi di Indonesia pada tahun 2018, dengan jumlah lahan yang terbakar mencapai 529.266,64 hektar, dimana dari total tersebut merupakan bagian dari jumlah lahan yang terbakar di Provinsi Sumatera Selatan yaitu seluas 16.226,60 hektar (SiPongi, 2020). Berdasarkan data Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir (OI) pada Tahun 2018 yaitu seluas 3.925 hektar (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2019).

Kebakaran lahan di Indonesia sebagian besar terjadi pada lahan basah. Kebakaran tersebut diperparah karena musim kemarau panjang dan wilayah yang didominasi oleh

rawa gambut sehingga api lebih cepat menyebar dan sulit dipadamkan. Kabupaten OI merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dimana wilayahnya didominasi oleh lahan basah (65%), yang selalu mengalami kebakaran lahan setiap tahunnya. Kejadian kebakaran disebabkan oleh ulah manusia (99%), baik secara sengaja maupun tidak disengaja, yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu faktor pengetahuan, faktor budaya, faktor sosial, faktor ekonomi, dan peran kebijakan, serta 1% disebabkan oleh alam (Balch et al., 2017; Chelsea Nagy, Fusco, Bradley, Abatzoglou, & Balch, 2018; Wetlands International - Indonesia Programme, 2006).

Loren *et al.*, dalam penelitiannya, menyatakan bahwa penyebab dominan kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar, kemudian diikuti karena kelalaian manusia karena membuang puntung rokok sembarangan (Loren, Ruslan, Yusran, & Rianawati, 2015). Oleh karena itu, melihat dari banyaknya kasus kebakaran di Kabupaten OI pada tahun 2018-2019 menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor manusia sebagai penyebab kejadian kebakaran lahan basah di Kabupaten OI, Provinsi Sumatera Selatan, yang ditinjau dari faktor pengetahuan, faktor budaya, faktor sosial, faktor ekonomi, dan peran kebijakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, telaah dokumen dan wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu masyarakat yang pernah dihukum penjara karena membakar lahan sebanyak 4 orang, serta informan biasa yaitu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OI sebanyak 2 orang, dan pihak Polres OI sebanyak 2 orang. Hasil penelitian disajikan dalam

bentuk narasi impresionis yaitu menceritakan kembali berdasarkan penemuan yang sebenarnya dari lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Ogan Ilir (OI) terletak di jalur strategis yaitu jalur lintas timur yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung dan memiliki luas wilayah sebesar 2.666,07 km<sup>3</sup>. Kabupaten ini memiliki 16 kecamatan yaitu Muara Kuang, Tanjung Batu, Tanjung Raja, Indralaya, Pemulutan, Rantau Alai, Indralaya Utara, Indralaya Selatan, Pemulutan Selatan, Pemulutan Barat, Rantau Panjang, Sungai Pinang, Kandis, Rambang Kuang, Lubuk Keliat, dan Payaraman. Kabupaten OI memiliki iklim tropis basah tipe B dengan musim kemarau berkisar pada Bulan Mei hingga Oktober. Sebagian besar wilayah OI terdiri dari lahan basah berupa rawa lebak, rawa pasang surut, tanah gambut dan bergambut. Diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OI, data kebakaran lahan di Kabupaten OI dari Bulan Januari hingga September 2019 mencapai sekitar 738 hektar. Selain itu, diketahui juga titik *hotspot* terbanyak berada di wilayah Kecamatan Indralaya Utara, Pemulutan, dan Pemulutan Barat (Lestari, Novrikasari, Fujianti, & Fatturahma, 2020). Dimana lokasi-lokasi kebakaran ini berada di area lahan basah, seperti gambut, bergambut, dan rawa yang mengering karena musim kemarau.

Dari hasil wawancara dengan pihak BPBD dan Polres OI diketahui bahwa kebakaran lahan yang terjadi di OI sering terjadi pada siang hari di musim kemarau. Kebakaran ini terjadi sebagian besar dikarenakan aktivitas manusia dan diperburuk dengan kondisi lingkungan yang kering sehingga memudahkan api untuk menyebar. Melalui wawancara ini juga diketahui bahwa sebagian besar kejadian kebakaran di OI merupakan akibat dari faktor manusia, seperti membuang puntung rokok sembarang dan membakar sampah.

Dari hasil penelitian ini kemudian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi manusia melakukan pembakaran, yang meliputi faktor pengetahuan, faktor budaya, faktor sosial, faktor ekonomi, dan peran kebijakan.

Faktor pengetahuan meliputi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait bahaya dan risiko dari kebakaran lahan serta tindakan pemadaman seperti apa yang perlu dilakukan ketika terjadi kebakaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa masyarakat sudah mengetahui bahaya dan risiko yang dapat timbul akibat kebakaran lahan, namun masyarakat belum memahami secara mendalam terkait tipe kebakaran lahan itu sendiri sehingga belum mengetahui bahwa kebakaran dapat terjadi dibawah permukaan tanah tanpa dipengaruhi oleh angin. Tipe kebakaran ini dapat terjadi pada lahan gambut. Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki kemampuan dalam pemadaman api dikarenakan masyarakat hanya mampu menggunakan alat seadanya dalam melakukan penyiraman/pemadaman api dan hanya mampu menjangkau area-area yang mudah diakses saja sehingga masih mengandalkan bantuan dari BPBD OI apabila terjadi kebakaran lahan yang besar.

Dari informan kunci penelitian ini diketahui alasan mengapa mereka membakar lahan, dapat disimpulkan kebakaran yang terjadi disebabkan karena faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan, sengaja membakar lahan hingga akhirnya terjadi kebakaran besar dan ketidaksengajaan akibat dari membakar sampah sehingga meluas ke lahan sekitar melalui media angin. Seperti pemaparan dari hasil wawancara sebelumnya, walaupun masyarakat telah mengetahui bahaya dan risiko dari kebakaran lahan, mereka tetap melakukan pembakaran melalui teknik pembakaran terkendali dengan asumsi bahwa kecil kemungkinan akan terjadi kebakaran besar. Namun sayangnya, pembakaran terkendali tidak selamanya efektif dalam pencegahan kebakaran lahan apabila tidak dilakukan dengan benar karena masih ada kemungkinan terjadinya loncatan atau

penjalaran api (Adinugroho, Suryadiputra, Saharjo, & Siboro, 2005). Teknik pembakaran terkendali setidaknya harus dilakukan dengan syarat luas lahan tidak melebihi 1-2 hektar, kondisi angin tidak terlalu kuat, dan tidak terdapat lahan tidur bersemak belukar disekitarnya (Adinugroho et al., 2005).

Penelitian Saharjo dan Wibisana menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran lahan sangat beragam, ada yang sudah mengerti namun tidak berpartisipasi, serta ada pula beberapa lainnya tidak peduli dan sebagian besar masyarakat sudah mengetahui penyebab kebakaran dan dampak yang ditimbulkan (Saharjo & Wibisana, 2017). Pengetahuan seseorang mengenai kebakaran dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman sebab semakin tinggi pengetahuan seseorang maka kemampuan untuk menyerap informasi dan ilmu baru akan lebih mudah. Namun masyarakat yang tidak berpendidikan juga memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan kebakaran yaitu dengan diberikan pelatihan dan sosialisasi secara berkala (Yuhana & Iskandar, 2017).

Sejalan dengan penelitian Ningrum *et al.*, bahwa pengetahuan masyarakat yang didapatkan dari pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non-formal seperti sosialisasi dari pemerintah atau organisasi setempat berhubungan dengan tingkat partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Ningrum, 2019). Ketidaktahuan masyarakat terkait kebakaran lahan yang meliputi bahaya dan risiko kebakaran lahan, tindakan pengendalian kebakaran lahan, serta teknik pemadaman seringkali melatarbelakangi tindakan pembakaran lahan. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman yang cukup melalui penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam meminimalisir kejadian kebakaran hutan dan lahan karena semakin luas pengetahuan dan informasi yang dimiliki seseorang maka akan semakin positif pula perilakunya.

Faktor budaya diketahui menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat dalam melakukan pembakaran lahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak BPBD OI terkait faktor budaya masyarakat di Kabupaten OI diketahui bahwa masyarakat sudah terbiasa melakukan pembakaran untuk membuka lahan karena dianggap merupakan cara yang cepat dan hemat. Kebiasaan yang sudah membudaya ini disebut *sonor* atau melakukan pembersihan lahan dengan cara bakar. Budaya *sonor* selalu dilakukan hampir setiap tahun di semua wilayah OI. Budaya *sonor* merupakan salah satu kearifan lokal di Sumatera Selatan yang dilakukan masyarakat untuk membakar sisa-sisa hasil pertanian yang telah menumpuk, umumnya dilakukan pada kegiatan bersawah. Pembakaran ini bertujuan untuk mempermudah penanaman kembali. Selain budaya *sonor*, terdapat pula budaya *handel* yang dilakukan masyarakat Dayak dalam aktivitas pembukaan lahan. Budaya *handel* dilakukan dengan memperhatikan aturan dan ritual-ritual adat setempat serta teknik-teknik pembukaan lahan yang meliputi pemilihan waktu dan tata urutan membakar (Hadiwijoyo, Saharjo, & Putra, 2017).

Selain itu, masyarakat OI juga beranggapan bahwa membakar lahan dapat membuat kondisi tanah menjadi gembur dan subur serta dapat menghilangkan hama, nyamuk, dan ular. Masyarakat tidak mengetahui bahwa pembakaran lahan secara terus menerus justru dapat menurunkan kualitas kesuburan tanah. Parameter kesuburan tanah meliputi sifat fisik dan sifat kimia tanah. Sifat fisik tanah terdiri dari kerapatan lindak (*bulk density*), porositas, permeabilitas, dan kandungan fraksi tanah (tekstur tanah). Sementara sifat kimia tanah terdiri dari pH tanah, bahan organik tanah, Daya Hantar Listrik (DHL), Kapasitas Tukar Kation (KTK), unsur hara makro (N, P, K, Ca, Mg), dan unsur hara mikro (Fe, Na, Mn, Zn, Cu) (Mpapa, 2016; Murtinah, Edwin, & Bane, 2017). Lahan yang terbakar, terutama lahan gambut, akan mengalami penurunan kandungan unsur hara, *bulk density* tinggi

(tanah semakin padat) sehingga akan menurunkan porositas dan permeabilitas tanah yang menyebabkan aerasi dan drainase dalam tanah terhambat, tekstur tanah berpasir sehingga sulit menahan air dan menyerap unsur hara, tidak mengalami penurunan tingkat keasaman yang tinggi dalam tanah, serta menurunnya bahan organik tanah yang dapat mempengaruhi nilai KTK (Ketterings & Bigham, 2000; Ketterings, Bigham, & Laperche, 2000; Murtinah et al., 2017; Novara, Gristina, Bodì, & Cerdà, 2011; Pinatih, Kusmiyarti, & Susila, 2015). Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, diketahui bahwa dengan membakar lahan tidak berdampak pada peningkatan kesuburan tanah, justru berakibat pada kerusakan lahan dan ekosistem. Kepercayaan masyarakat OI mengenai adanya peningkatan kualitas tanah setelah aktivitas pembakaran menjadi penyebab budaya ini sulit dihilangkan. Untuk itu, perlu peningkatan pemahaman masyarakat terkait strategi pengendalian kebakaran serta pemahaman tentang lahan itu sendiri melalui sosialisasi dan pelatihan.

Faktor sosial juga menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pembakaran lahan. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat konflik sosial pada masyarakat yang tinggal disekitar lahan dengan kepemilikan pihak lain. Lahan dengan kepemilikan pihak lain memiliki luas yang jauh lebih besar dari lahan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak jarang lahan mereka dikelilingi oleh lahan milik pihak lain. Lahan dengan kepemilikan pihak lain ini sebagian besar merupakan lahan tidur atau lahan yang tidak dikelola atau dirawat sehingga dipenuhi semak belukar.

Menurut masyarakat, pemilik lahan dinilai kurang peduli sehingga seringkali menyebabkan lahan tersebut tidak terawat dan menjadi sarang hama yang dapat mengganggu kegiatan bertani mereka, karena lahan mereka tertutupi oleh semak belukar. Masyarakat menghadapi kondisi dilematis. Lahan milik mereka merupakan sumber mata pencaharian sehingga selalu dikelola

dan diawasi karena digunakan untuk bertani, sementara lahan dengan kepemilikan pihak lain tidak dapat mereka kelola karena dilarang oleh pemilik lahan, namun jika dibiarkan saja, lahan tersebut akan dipenuhi oleh semak belukar yang dapat menjadi sarang ular dan hama. Kondisi yang mengganggu tersebut menyebabkan timbul rasa dirugikan dalam masyarakat kepada pemilik lahan dan pada akhirnya masyarakat memilih untuk membersihkan lahan dengan cara membakar.

Faktor sosial yang kurang terjalin dengan baik dilatarbelakangi oleh adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khalwani *et al.*, bahwa akar permasalahan penyebab kebakaran adalah faktor sosial ekonomi masyarakat (Khalwani, Bahruni, & Syaufina, 2017). Selain itu, kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi dan peduli terhadap kejadian kebakaran juga menjadi bentuk kontak sosial yang rendah. Ketidakpedulian pemilik lahan terhadap lahan yang mereka miliki sehingga menjadikan lahan tersebut sebagai sumber bahaya bagi masyarakat sekitar merupakan suatu tindakan egoitis. Salah satu tindakan yang tepat dalam meminimalisir faktor sosial ini adalah dengan mengizinkan masyarakat sekitar dapat mengelola lahan tersebut untuk bertani apabila lahan tersebut belum akan digunakan atau dialihfungsikan oleh pemilik lahan itu sendiri dan keuntungan dari hasil pertaniannya dapat dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan masyarakat. Penegakkan hukum terkait kepemilikan lahan yang tidak jelas kepemilikannya berdasarkan letak tanah sesuai domisili pemilik, maka lahan tersebut dapat diambil alih oleh pemerintah (Peraturan Menteri Agraria, 2016). Maka dari itu sejak diterbitkannya sertifikat hak kepemilikan tanah, pemilik lahan berkewajiban untuk memanfaatkan lahannya secara efektif sesuai dengan peruntukannya.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pembakaran lahan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi, dalam penelitian ini, berkaitan erat

dengan pendapatan masyarakat dan pembiayaan dalam pengelolaan lahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa waktu dan biaya merupakan alasan terbesar masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan. Membuka lahan dengan cara membakar sangat mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya yang besar, serta tidak memerlukan waktu yang lama. Selain itu, penghasilan yang kurang juga memicu masyarakat untuk membakar demi mendapatkan upah atau bayaran dari pemilik lahan.

Untuk pembukaan lahan, biaya pembakaran jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya penebangan menggunakan alat berat, dan jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara manual. Pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat memang dapat mempermudah pekerjaan namun masyarakat tidak memiliki fasilitas tersebut sehingga harus menyewanya. Harga sewa untuk satu alat berat yang relatif tinggi, membuat masyarakat lebih memilih cara yang lebih murah dan sesuai dengan kantong mereka. Selain itu, melakukan pembukaan lahan dengan cara manual (gotong royong) memerlukan waktu yang lama dan tenaga manusia yang banyak sehingga masyarakat beranggapan harus memberikan upah kerja pada yang membantu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irwandi, dimana masyarakat di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur juga memilih untuk mengolah/membersihkan lahan dengan cara membakar karena tidak membutuhkan biaya yang mahal dan waktu pembukaan lahan relatif lebih cepat (Irwandi, Jumani, & B, 2016). Untuk itu, peminjaman atau penyewaan fasilitas teknologi, dengan harga sewa yang terjangkau oleh masyarakat, untuk pembukaan dan pengolahan lahan bagi masyarakat seperti *bulldozer* atau *excavator* dan traktor oleh pemerintah setempat sehingga dapat mengurangi tindakan pembakaran lahan.

Selain itu, dalam melakukan penanaman kembali masyarakat memerlukan pupuk. Karena beranggapan bahwa dengan

membakar lahan dapat meningkatkan kesuburan tanah, maka masyarakat lebih memilih membakar lahan daripada harus mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk yang harganya jauh lebih mahal. Seperti dalam penelitian Irwandi, karena keterbatasan biaya akibat harga pupuk yang mahal, masyarakat di Desa Purwajaya memanfaatkan tanah hasil bakaran sebagai sumber alami untuk kesuburan tanaman (Irwandi et al., 2016).

Faktor peran kebijakan dalam penelitian berkaitan dengan regulasi atau peraturan perundangan yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihan Polres OI diketahui bahwa peraturan dan kebijakan terkait pembakaran lahan sudah ada namun pembakaran lahan tetap saja dilakukan. Hal ini berhubungan dengan faktor sosial dan ekonomi yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk membakar lahan. Pihak kepolisian setempat dan BPBD sudah melakukan tindakan penangkapan bagi pelaku pembakaran dan memberikan hukuman. Pengawasan terus dilakukan guna mencegah kebakaran lebih besar lagi.

Peraturan dibuat untuk mengatur segala sesuatu agar masyarakat dapat hidup tertib dan teratur. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 56 tentang Perkebunan yang menjelaskan bahwa adanya larangan setiap orang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar serta berkewajiban untuk memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Namun peraturan ini telah diubah berdasarkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 Pasal 69 ayat 1 huruf H dan Pasal 2 yang menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan namun dengan syarat harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal daerah masing-masing yaitu pembakaran dilakukan berdasarkan ketentuan luas maksimal dua hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal serta

membuat sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api.<sup>35</sup> Di Indonesia, berbagai upaya perlindungan hutan telah diatur melalui regulasi-regulasi mulai dari Undang-Undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, SK Menteri hingga Dirjen. Namun upaya ini masih belum memberikan hasil yang optimal dalam pencegahan kebakaran lahan terbukti masih adanya kasus kejadian kebakaran setiap tahunnya di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia, 2020).

## KESIMPULAN

Dengan menganalisis lebih dalam akar permasalahan dari faktor manusia sebagai penyebab kejadian kebakaran lahan basah di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, diketahui bahwa faktor sosial dan ekonomi menjadi penyebab utama kenapa masyarakat melakukan pembakaran sehingga berakibat pada kejadian kebakaran lahan yang besar. Faktor sosial berupa konflik sosial terhadap lahan dengan kepemilikan orang lain sehingga mengakibatkan masyarakat berada pada kondisi dilematis. Lahan dengan kepemilikan orang lain yang sebagian besar tidak dikelola atau dimanfaatkan menjadi lahan tidur yang dipenuhi semak belukar sehingga menjadi sarang hama dan ular, hal inilah yang meresahkan warga karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan ladang milik mereka. Sementara, faktor ekonomi yang ditemukan berkaitan erat dengan masalah pembiayaan terhadap pengelolaan lahan itu sendiri. Masyarakat lebih memilih cara yang murah dan efektif dalam pembukaan lahan. Untuk itu, peningkatan pemahaman masyarakat terkait lahan itu sendiri serta bahaya dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan, dan bagaimana strategi pengendalian kebakaran

sangat diperlukan dengan melalui penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi. Selain itu, memberikan peminjaman atau penyewaan alat-alat berat seperti *bulldozer* atau *excavator* dan traktor oleh pemerintah setempat dengan harga sewa yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dalam hal pembiayaan untuk membuka lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. C., Suryadiputra, I. N. N., Saharjo, B. H., & Siboro, L. (2005). *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan* (B. H. Saharjo, Ed.). Bogor, Indonesia: Wetlands International-Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.
- Akbar, A., Faidil, S., Adriani, S., & Saefudin. (2013). Kebakaran Hutan dan Lahan Rawa Gambut: Penyebab Faktor Pendukung dan Alternatif Pengelolaannya. In *Ekspose Hasil Penelitian BPK Banjarbaru*.
- Balch, J. K., Bradley, B. A., Abatzoglou, J. T., Chelsea Nagy, R., Fusco, E. J., & Mahood, A. L. (2017). Human-Started Wildfires Expand the Fire Niche across the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 114(11), 2946–2951.
- Beja, H., Mella, W. I. I., & Soetedjo, I. N. P. (2015). Sistem Tebas Bakar dan Pengaruhnya terhadap Komponen Fisik Kimia Tanah Serta Vegetasi pada Ladang dan Lahan Bera (Studi Kasus di Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Keteknik Pertanian*, 3(2), 129–136.
- Chelsea Nagy, R., Fusco, E., Bradley, B., Abatzoglou, J. T., & Balch, J. (2018). Human-Related Ignitions Increase the Number of Large Wildfires across U.S. Ecoregions. *Fire*, 1(1), 1–14.
- Dey, N. P. H., Djumaty, B. L., & Kunci, K. (2020). Social Change In Indigenous Peoples Post Prohibition Of Land Combustion In Lopus Village Lamandau District. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 09(1), 51–71.
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. (2019). *Data Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir*.
- Hadiwijoyo, E., Saharjo, B. H., & Putra, I. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah Dalam Melakukan Penyiapan Lahan Dengan Pembakaran. *Jurnal Silviculture Tropika*, 8(1), 1–8.
- Harahap, F. R. (2016). Pengelolaan Lahan Basah Terkait Semakin Maraknya Kebakaran dengan Pendekatan Adaptasi yang Didasarkan pada Konvensi Ramsar. *Jurnal Society*, 4(2), 38–47.
- Irwandi, Jumani, & B, I. (2016). Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Agrifor*, 15(2), 201–210.
- Ketterings, Q. M., & Bigham, J. M. (2000). Soil Color as an Indicator of Slash-and-Burn Fire Severity and Soil Fertility in Sumatra, Indonesia. *Soil Science Society of America Journal*, 64(5), 1826–1833.
- Ketterings, Q. M., Bigham, J. M., & Laperche, V. (2000). Changes in Soil Mineralogy and Texture Caused by Slash-and-Burn Fires in Sumatra, Indonesia. *Soil Science Society of America Journal*, 64(3), 1108–1117.
- Khalwani, K. M., Bahrani, B., & Syaufina, L. (2017). Nilai Kerugian dan Efektivitas Pencegahan Kebakaran Hutan Gambut (Studi Kasus di Taman Nasional Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah). *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 2(3), 214.
- Lestari, M., Novrikasari, F ujianti, P., &



- Fatturahma, N. Z. (2020). Forest and Wetland Fire in Ogan Ilir Regency. *Atlantis Press*, 25(SICPH 2019), 434–436.
- Loren, A., Ruslan, M., Yusran, F. H., & Rianawati, F. (2015). Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Pencegahan yang Dilakukan Masyarakat di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. *Jurnal Enviroscientiae*, 11, 1–9.
- Masganti, Wahyunto, Ai Dariah, Nurhayati, R. Y. (2014). Characteristics and Potential Utilization of Degraded Peatlands in Riau Province. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 8(1), 59–66.
- Mpapa, B. L. (2016). Analisis Kesuburan Tanah Tempat Tumbuh Pohon Jati (*Tectona Grandis* L.) Pada Ketinggian Yang Berbeda. *Jurnal Agrista Unsyiah*, 20(3), 135–139.
- Murtinah, V., Edwin, M., & Bane, O. (2017). Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 5(2), 128–139.
- Ningrum, M. (2019). Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Pertanian Indonesia. Retrieved November 24, 2020, from <http://incagri.com/read/1620/artikel/pemanfaatan-lahan-gambut-untuk-pertanian-indonesia.html>
- Novara, A., Gristina, L., Bodì, M. B., & Cerdà, A. (2011). The impact of fire on redistribution of soil organic matter on a Mediterranean hillslope under maquia vegetation type. *Land Degradation and Development*, 22(6), 530–536.
- Nurkholis, A., Rahma, A. D., Widyaningsih, Y., Maretya, D. A., Wangge, G. A., Widiastuti, A. S., ... Abdillah, A. (2016). *Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (Studi Kasus Provinsi Riau)*.
- Peraturan Menteri Agraria. *Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian*. , Pub. L. No. 18 (2016).
- Perwitasari, D., & Sukana, B. (2012). Gambaran Kebakaran Hutan dengan Kejadian Penyakit ISPA dan Pneumonia di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Tahun 2008. *Indonesian Journal of Health Ecology*, 11(2), 147–157.
- Pinatih, I. D. A. S. P., Kusmiyarti, T. B., & Susila, K. D. (2015). Evaluasi Status Kesuburan Tanah pada Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan. *Agroteknologi Tropika*, 4(4), 282–292.
- Rahmawaty, Rauf, A., & Siregar, A. Z. (2014). Kajian Sebaran Lahan Gambut sebagai Lahan Padi di Pantai Timur Sumatera Utara. *Warta Konservasi Lahan Basah Wetlands International Indonesia*, 22(3), 10–11.
- Saharjo, B. H., Syaufina, L., Nurhayati, A. D., Putra, E. I., Waldi, R. D., & Wardana. (2018). *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap* (Cetakan I; A. D. Gumelar, Ed.). Bogor, Indonesia: PT Penerbit IPB Press.
- Saharjo, B. H., & Wibisana, G. (2017). Persepsi Masyarakat dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 08(2), 141–146.
- SiPongi. (2020). *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020* (Vol. 2020).
- Sukana, B., & Bisara, D. (2015). The Effect of Forest Fire on Acute Respiratory Infection and Pneumonia in Pulang Pisau District, Central Kalimantan. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 14(3), 250–258.
- Tacconi, L. (2003). Kebakaran hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan. *Center for International Forestry Research*, 38(i).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Perkebunan*. , Pub. L. No. 39 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Cipta Kerja*. , Pub. L. No. 11 (2020).
- Wahyunto, Ritung, S., Nugroho, K.,

- Sulaiman, Y., & Hikmarullah. (2013). Peta Arah Lahan Gambut Terdegradasi di Pulau Sumatera Skala 1:250.000. In *Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian*. Bogor.
- Wetlands International - Indonesia Programme. (2006). *Strategi dan Rencana Tindak Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan*. Jakarta.
- Yuhana, W., & Iskandar. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut (Studi Kasus Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal Hutan Lestari*, 5(4), 1016–1026.